

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan lima puluh delapan literatur yang berupa jurnal dan laporan, penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian, bahwa:

1. Agar sistem *whistleblowing* dianggap efektif, sistem *whistleblowing* harus memiliki elemen berupa pelapor pelanggaran (*whistleblower*), pelanggaran yang dilaporkan, pelaku pelanggaran, penerima laporan (*designated officer*), tindakan pelaporan, dan hasil pelaporan. Sistem *whistleblowing* yang efektif juga memberikan manfaat kepada perusahaan yaitu menjadi alat komunikasi antara pemangku kepentingan dan perusahaan untuk mendeteksi pelanggaran, memberikan cara etis untuk mencegah, menghentikan, dan memperbaiki pelanggaran, menjadi alat tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal, melindungi sumber daya perusahaan sekaligus meningkatkan kinerjanya, serta memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan biaya implementasinya;
2. Terdapat dua jenis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem *whistleblowing*, yaitu faktor-faktor langsung dan faktor-faktor tidak langsung. Faktor-faktor langsung mempengaruhi kinerja sistem *whistleblowing*, dan terdiri dari prosedur dan rancangan sistem *whistleblowing*, kualitas informasi, tenaga kerja dan sumber daya perusahaan, siapa yang menjadi *designated officer*, serta kemampuan komunikasi *designated officer*. Sedangkan faktor-faktor tidak langsung mempengaruhi motivasi seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing* dan terdiri dari faktor-faktor intrinsik dan tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan, faktor-faktor intrinsik dan dapat dipengaruhi perusahaan, serta faktor-faktor ekstrinsik dan dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Faktor-faktor intrinsik dan tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan meliputi karakteristik pribadi, hubungan kekuatan dan konteks situasi, motivasi pelanggaran, materialitas pelanggaran, negara dan karakteristik budayanya, serta peraturan negara mengenai *whistleblowing*. Faktor-faktor intrinsik dan dapat dipengaruhi perusahaan meliputi moralitas, loyalitas, rasa tanggung jawab, dan pandangan mengenai *whistleblowing*. Faktor-faktor ekstrinsik dan dapat dipengaruhi oleh perusahaan meliputi

budaya sosial, lingkungan, respon, dan sifat perusahaan, pengetahuan mengenai akuntansi dan pelanggaran, pengetahuan mengenai sistem *whistleblowing*, tingkat perlindungan identitas *whistleblower*, serta ketergantungan perusahaan terhadap pelanggaran;

3. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas sistem *whistleblowing*. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem *whistleblowing* yang terdiri dari upaya melalui faktor-faktor langsung, upaya melalui faktor-faktor tidak langsung, serta upaya melalui faktor-faktor langsung dan tidak langsung. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan melalui faktor-faktor langsung meliputi sistem *whistleblowing* sebagai fungsi kepatuhan, mengimplementasi sarana pelaporan, melakukan panggilan balik atau komunikasi yang berkelanjutan, mengevaluasi kinerja sistem *whistleblowing* dan pelanggaran yang terjadi, menunjuk *designated officer* yang independen, berpengalaman, dan terlatih, serta menunjuk komite audit sebagai penanggung jawab sistem *whistleblowing*. Upaya melalui faktor-faktor tidak langsung meliputi membentuk budaya perusahaan, pelatihan mengenai pelanggaran, penyebaran proses *whistleblowing*, penghargaan terhadap *whistleblower*, serta mengimplementasi mekanisme pelaporan anonim atau dengan perlindungan identitas *whistleblower*. Upaya melalui faktor-faktor langsung dan tidak langsung meliputi membuat prosedur, kebijakan, pengawasan, dan dokumentasi atas sistem *whistleblowing*, serta penyebaran penyelesaian kasus pelanggaran;
4. Selama periode 2002-2016, banyak perusahaan belum dapat memanfaatkan *whistleblowing* secara optimal khususnya di Indonesia karena budayanya yang belum terlepas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di Indonesia belum terdapat penelitian mengenai *whistleblowing* yang mendalam.

## 5.2. Saran

Untuk dapat meningkatkan efektivitas sistem *whistleblowing*, terdapat berbagai upaya yang telah disebutkan pada sub bab 5.1. Namun tentunya diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai *whistleblowing*, khususnya di Indonesia, agar dapat digunakan seoptimal mungkin dalam mengatasi pelanggaran. Serta diperlukan juga campur tangan pemerintah untuk mengawasi peraturan mengenai *whistleblowing* dan *whistleblower* agar memberikan dampak positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, G. W., Campbell, D. R., Campbell, M., & Rose, M. P. (2006). Fraud Prevention. *The CPA Journal*, 56-59.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination*. Mason: Cengage Learning, Inc.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2016). *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Austin: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2014). *Accounting Information Systems*. London: Pearson.
- Bogdanovic, M., & Tyll, L. (2016). Attitude of Management Students Towards Whistleblowing: Evidence From Croatia. *Central European Business Review*, 45-61.
- Carson, T. L., Wokutch, R., & Verdu, M. E. (2007). Whistle-Blowing for Profit: An Ethical Analysis of the Federal False Claims Act. *Journal of Business Ethics*, 361-376.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2004). *Enterprise Risk Management - Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Retrieved January 31, 2016, from Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Web site: [http://www.coso.org/documents/990025p\\_executive\\_summary\\_final\\_may20\\_e.pdf](http://www.coso.org/documents/990025p_executive_summary_final_may20_e.pdf)
- Curtis, M. B., & Taylor, E. Z. (2009). Whistleblowing in Public Accounting: Influence of Identity Disclosure, Situational Context, and Personal Characteristics. *Accounting and the Public Interest*, 191-220.
- Dasgupta, S., & Kesharwani, A. (2010). Whistleblowing: A Survey of Literature. *The IUP Journal of Corporate Governance*, 57-70.
- DeFlaminis, W., Bryant, S. P., Cook, J., & Kirschbaum, D. (2014). An Ounce of Prevention: A Guide for Combating Fraud in Construction. *The Construction Law*, 17-27, 49.
- Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited. (2014). *Lead by Example: Making Whistleblowing Programs Successful in Corporate India*. India: Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited.
- Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited. (2015). *India Banking Fraud Survey*. India: Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited.
- Devillier, N. (2016). Whistleblowing Policy and Corporate Governance Strategy. *Grenoble Ecole de Management*, 42-58.
- Eaton, T. V., & Akers, M. D. (2007). Whistleblowing and Good Governance. *The CPA Journal*, 66-71.

- Erkmen, T., Caliskan, A. O., & Esen, E. (2012). An Empirical Research About Whistleblowing Behavior in Accounting Context. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 229-243.
- Ernst & Young (EY). (2016). *Global Fraud Survey*. Ernst & Young.
- Ethics Resource Center (ERC). (2013). *National Business Ethics Survey of the U.S. Workforce*. Arlington County: Ethics Resource Center (ERC).
- Fredin, A. (2012). The Unexpected Cost of Staying Silent. *IMA Research*, 53-59.
- Guthrie, C. P., Norman, C. S., & Rose, J. M. (2012). Chief Audit Executives' Evaluations of Whistle-Blowing Allegations. *Behavioral Reserach in Accounting*, 87-99.
- Hamid, M. H., & Zainudin, N. (2012). Whistleblowing: An Organizational Support Perspective. *International Journal of Management Research & Review*, 479-487.
- Hermanson, D. R., & Rittenberg, L. E. (2003). *Internal Audit and Organizational Governance*. Altamonte Springs: The Institute of Internal Auditors (IIA).
- Kaplan, S. E., Pope, K. R., & Samuels, J. A. (2010). The Effect of Social Confrontation on Individuals' Intentions to Internally Report Fraud. *Behavioral Research in Accounting*, 51-67.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). (2006). *Fraud Survey 2006*. Melbourne & Brisbane: Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).
- Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). (2016). *Fraud Barometer*. United Kingdom: Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing System- WBS)*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

- Lee, G., & Fargher, N. (2012). Companies' Use of Whistle-Blowing to Detect Fraud: An Examination of Corporate Whistle-Blowing Policies. *J Bus Ethics*, 283-295.
- Leinicke, L. M., Ostrosky, J. A., & Rexroad, W. M. (1994). Fraud Hotlines. *The Internal Auditor*, 36-42.
- Libit, W. M., Draney, W. L., & Freier, T. E. (2014). Silence Is Not Necessarily Golden: Elements of an Effective Whistleblower Hotline. *Insights*, 10-16.
- Macey, J. (2007). Getting the Word Out About Fraud: A Theoretical Analysis of Whistleblowing and Insider Trading. *Michigan Law Review*, 1899=1940.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2015-2019*. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in Organizations: An Examination of Correlates of Whistleblowing Intentions, Actions, and Retaliation. *Journal of Business Ethics*, 277-297.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). *Whistle-blowing in Organizations*. New York: Taylor & Francis Group, LLC.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2009). A Word to the Wise: How Managers and Policy-Makers can Encourage Employees to Report Wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 379-396.
- Ministry of Service Alberta. (2013). *Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act - Best Practices for Key Elements of a Whistleblower Policy and Procedure*. Ministry of Service Alberta.
- Moberly, R. E. (2006). Sarbanes-Oxley's Structural Model to Encourage Corporate Whistleblowers. *Brigham Young University Law Review*, 1107-1180.
- National Credit Union Administration. (2012). NCUA: Tips to Combat Fraud. *Credit Union Magazine*, 40.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing. *Journal of Business Ethics*, 1-16.
- Nielsen, R. P. (2013). Whistle-Blowing Methods for Navigating Within and Helping Reform Regulatory Institutions. *J Bus Ethics*, 385-395.

- Parliament of the United Kingdom. (1998). *Public Interest Disclosure Act*. United Kingdom: Parliament of the United Kingdom.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Presiden Republik Indonesia.
- PricewaterhouseCoopers (PwC). (2016). *Global Economic Crime Survey 2016*. PricewaterhouseCoopers (PwC).
- PT Aneka Tambang, Tbk. (2016). *Laporan Tahunan 2016*. Jakarta: PT Aneka Tambang, Tbk.
- Public Concern at Work (PCaW). (2010). *Where's Whistleblowing Now?* London: Public Concern at Work (PCaW).
- Rehg, M. T., Miceli, M. P., Near, J. P., & Scotter, J. R. (2008). Antecedents and Outcomes of Retaliation Against Whistleblowers: Gender Differences and Power Relationships. *Organization Science*, 221-240.
- Robinson, S. N., Robertson, J. C., & Curtis, M. B. (2012). The Effects of Contextual and Wrongdoing Attributes on Organizational Employees' Whistleblowing Intentions Following Fraud. *J Bus Ethics*, 213-227.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information System*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Saleh, A. O. (2008, September 26). *Perlindungan bagi Whistle Blower*. Retrieved from tempo.co:  
<https://www.tempo.co/read/kolom/2008/09/26/29/perlindungan-bagi-whistle-blower>
- Sawyer, L. (2012). *Sawyer's Guide for Internal Auditors*. Altamonte Springs: The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF).

- Schwartz, E. (2006). Hotlines for Compliance. *InfoWorld*, 8.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Senate and House of Representatives of the United States of America. (1989). *Whistleblower Protection Act*. Washington, DC: Senate and House of Representatives of the United States of America.
- Senate and House of Representatives of the United States of America. (2002). *Sarbanes-Oxley Act*. Senate and House of Representatives of the United States of America.
- Senate and House of Representatives of the United States of America. (2010). *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*. Washington, DC: Senate and House of Representatives of the United States of America.
- Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Fraud Awareness Survey of Private Sector in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 329-346.
- Slovin, D. (2006). Blowing the Whistle. *The Internal Auditor*, 8, 45-49.
- Susmanschi, G. (2012). Internal Audit and Whistle-Blowing. *Economics, Management, and Financial Markets*, 415-421.
- Tackett, J., Wolf, F., & Claypool, G. A. (2005). Anonymous Reporting Mechanisms: Hotlines Versus Questionnaires. *Internal Auditing*, 32-37.
- The Japan Times. (2015, July 24). *The Japan Times*. Retrieved from <http://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/24/national/crime-legal/toshiba-case-points-whistleblower-laws-shortcomings/#.WP7GfliGM2w>
- The Network, Inc. (2005). *Best Practices in Ethics Hotline*. The Network, Inc.
- United Nations. (2006). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. United Nations.
- Yeoh, P. (2014). Whistleblowing: Motivations, Corporate Self-Regulation, and the Law. *International Journal of Law and Management*, 459-474.